

IKLIM USAHA UKM DI ERA OTONOMI DAERAH

Johnny W. Situmorang^{*)} & Jannes Situmorang^{**)}

Abstrak

Kemiskinan dan pengangguran adalah problem nyata dan utama yang dihadapi oleh Indonesia sekarang dan masa akan datang. Bagaimana menghapuskan kemiskinan dan mengatasi pengangguran adalah merupakan target pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintahan Presiden SBY telah menetapkan tiga strategi utama untuk membangun kembali Indonesia dari krisis, dimana Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan elemen yang sangat sentral dalam strategi itu, serta melanjutkan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Namun, iklim usaha UKM belum kondusif untuk pengembangan peran UKM sebagai kekuatan ekonomi utama Indonesia. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peran UKM masih belum dapat diandalkan sepenuhnya. Pengembangan UKM dan ekonomi secara keseluruhan sangat tergantung pada iklim usaha.

Lingkungan strategis, manajemen strategik, birokrasi, rating dan peringkat, dan risiko politik, ekonomi, dan bisnis

I. Pengantar

Di tilik dari statistik Usaha Kecil Menengah (UKM), termasuk koperasi, posisi UKM sebagai dunia usaha sebenarnya harus menjadi kekuatan riil perekonomian Indonesia dan mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Dari jumlahnya saja, terlihat bahwa UKM mencapai 48 juta unit atau lebih dari 99.98% jumlah unit usaha yang ada di Indonesia. Sebanyak lebih dari 120 ribu unit adalah badan hukum berbentuk koperasi yang tersebar dari kota sampai ke desa. Kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih lebih besar daripada usaha besar (UB) dan sebagian besar tenaga kerja Indonesia ditampung oleh UKM. Besaran berdasarkan statistik ini, ternyata belum memperlihatkan kemampuan ekonomi nasional karena sampai saat ini Indonesia masih belum pulih benar dari krisis, kecuali terjaminnya stabilitas ekonomi makro setelah krisis ekonomi melanda Indonesia sejak tahun 1997.

^{*)} Peneliti senior non-aktif Kemenneg KUKM, Dosen Perbanas Asian Institute of Financial, Banking, and Information, Jakarta dan Bakrie School of Management, Jakarta

^{**)} Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

Strategi pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah, menempatkan UKM sebagai badan usaha yang sangat diandalkan untuk menggerakkan roda perekonomian menuju Indonesia maju. Strategi besar (*grand strategies*) Presiden SBY yang dikenal dengan “*triple track strategies* (TTS)” terdiri dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menggerakkan sektor riil dan dunia usaha, dan revitalisasi pertanian dan ekonomi perdesaan. TTS dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) secara konseptual sudah sangat tepat karena memberikan bobot yang sangat besar pada pergerakan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia. Khususnya bisa kita lihat harapan bagaimana sektor pertanian dan perdesaan sebagai orientasi pembangunan dan UKM sebagai dunia usaha yang menjadi pilar pelaku ekonomi. Sebagaimana sejarah pembangunan ekonomi negara maju dan pemulihan ekonomi dari krisis di negara-negara lainnya, seperti Thailand, Korea Selatan, Brazil, dan China yang sukses mengandalkan perdesaan dan UKM, Indonesia ingin menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan segera menjadi kekuatan ekonomi dunia ketika UKM-nya menjadi kekuatan riil. Kebijakan yang mendukung pemulihan itu, baik dari sisi fiskal dan moneter, telah menunjukkan hasil, tapi dalam kerangka pengelolaan stabilitas ekonomi makro. Sementara dari sisi ekonomi mikro yang mencakup sektor riil belum sepenuhnya berhasil. Sektor riil yang tidak bergerak secara nyata menjadi penyebab lambannya pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis. Bahkan kecenderungannya menjadi beban dalam strategi global Indonesia.

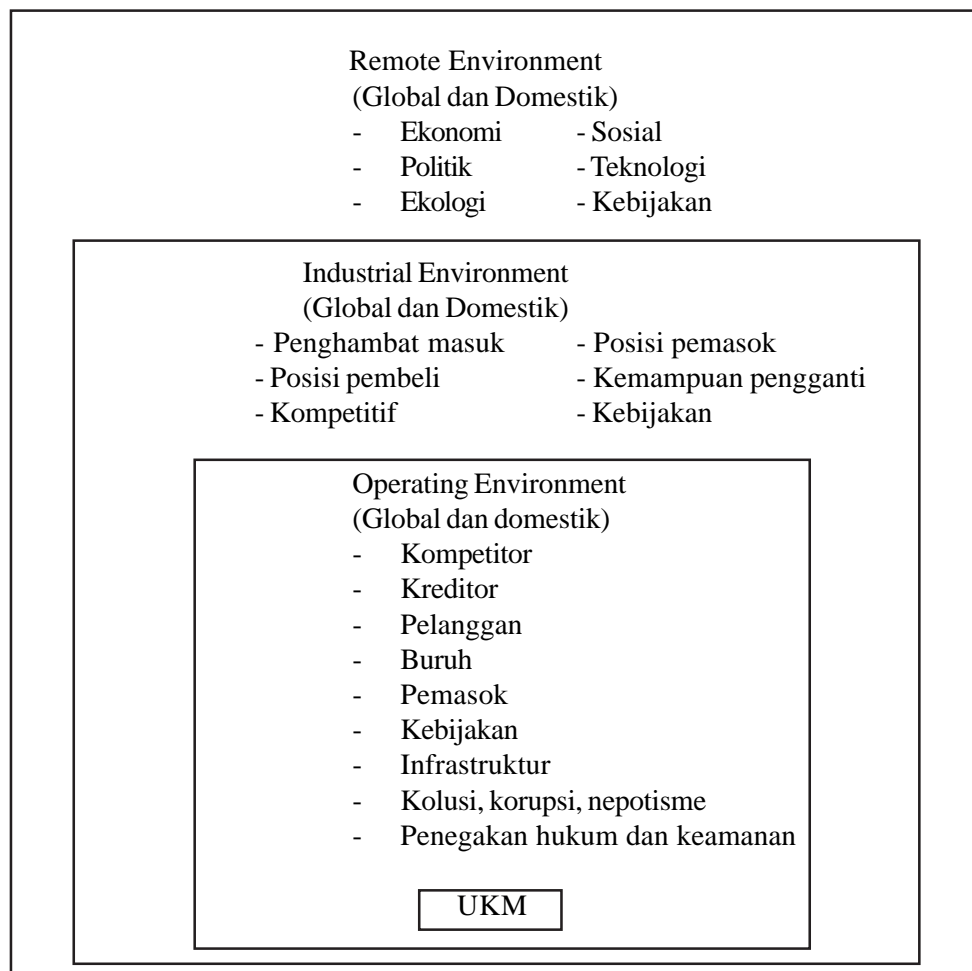
Faktor utama lemahnya sektor riil yang didominasi oleh UKM sebagai pelakunya adalah lingkungan strategis yang tidak kondusif. Lingkungan ini dikenal sebagai iklim usaha dimana ketika UKM ingin memainkan perannya menggerakkan sumberdaya ekonomi dan memasuki pasar lokal, regional, dan nasional dihadapkan pada hambatan yang lebih besar daripada peluang. Apalagi memasuki pasar internasional dan global, UKM sangat tidak mungkin menjadi salah satu pemain. Hal ini menyulitkan aliran kas dalam rangka akumulasi kapital untuk ekspansi bisnis. Seandainya ada UKM yang mampu memasuki pasar dengan tingkat persaingan tinggi, tak lebih karena kepiawaian pemilik usaha secara pribadi dalam menjalin jaringan bisnis. Pada umumnya, pelaku bisnis UKM hanya untuk bertahan hidup pada tingkat penciptaan laba normal yang dimulai sudah cukup memadai untuk sekedar mempertahankan hidup. Pengaruh lingkungan strategis ini semakin nyata ketika di era reformasi secara bersamaan terjadi perubahan sistem pemerintahan dan politik di Indonesia dengan otonomi daerah (Otda). Sistem ini semestinya mampu menjadi pendorong kemajuan UKM karena kewenangan kepala daerah yang sangat besar dapat mempengaruhi langsung performa UKM.

Dari uraian di atas, tulisan ini ingin menyoroiti bagaimana sebenarnya lingkungan atau iklim usaha UKM di era Otda. Tulisan ini menyoroiti berdasarkan kerangka pikir manajemen strategi yang dewasa ini telah berkembang menjadi ilmu dalam pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

II. Kerangka Analisis Iklim

Analisis iklim bisnis sangat baik diungkapkan dengan ilmu manajemen strategi yang dewasa ini sangat berkembang pesat tidak hanya di organisasi bisnis tetapi juga di organisasi pemerintahan. Secara umum dapat dinyatakan strategi sebagai bagian tak terpisahkan dalam dunia yang semakin kompetitif akibat perubahan lingkungan strategis dewasa ini. Lingkungan yang sangat nyata terlihat berubah adalah globalisasi dan sistem pemerintahan yang harus menerima globalisasi. Globalisasi mengandung berbagai elemen yang tidak hanya dalam konteks ekonomi, juga sosial, politik, dan demokrasi. Sehingga, setiap negara dan pemerintahan harus berubah agar bisa mengakomodasi perubahan akibat globalisasi. Untuk Indonesia sudah jelas terlihat dengan perubahan sistem pemerintahan ke arah otonomi daerah dari sistem pemerintahan sentralistik selama Orde Baru sampai tahun 1997.

Perkembangan manajemen strategi pada mulanya berasal dari perusahaan dan para ahli dan praktisi perusahaan. Strategi dipandang sebagai gugus pernyataan tentang rencana dan aksi perusahaan dalam memasuki pasar global. Pearce II dan Robinson (2000) ketika menerbitkan bukunya mengenai manajemen strategi edisi ke-7 menyatakan bahwa dewasa ini merupakan kulminasi dari pekerjaan lebih dari 20 tahun dalam bisnis dan perubahan utama rancangan yang mengakomodasikan strategi pada abad ke 21. Perubahan strategi sangat terkait dengan perubahan global. Bahkan beberapa pakar manajemen strategi, seperti Besando, Dranove, dan Shanley (1995) menyatakan bahwa strategi adalah fundamental dari kesuksesan organisasi. Kalau perusahaan mampu mengelola strategi maka perusahaan akan mampu bersaing dalam lingkungan apapun. Oleh karena itu, kita akan membutuhkan strategi yang mampu menghantar bisnis dalam perubahan lingkungan strategis. Menurut Yip (1992), seorang ahli dalam strategi global, menyatakan bahwa ketika globalisasi terjadi terdapat beberapa pertanyaan yang harus dapat dijawab untuk memasuki era global, yakni bagaimana manager dapat mengatasi kekuatan globalisasi? Perusahaan yang mana yang membutuhkan strategi global? Apa keberhasilan strategi global? Dan bagaimana organisasi bisnis mengimplementasikan inisiatif seluruh dunia?



Gambar 2. Model Lingkungan Sebagai Iklm UKM

Iklm yang digambarkan sebagai lingkungan dari bisnis baik perusahaan besar dan kecil (UKM) di Indonesia secara konseptual terlihat pada Gambar 1. Pada Gambar 1 tersebut terlihat tiga faktor lingkungan eksternal yang mempegaruhi iklm UKM baik dalam dimensi global maupun domestik. Lingkungan eksternal sangat jauh dinamakan sebagai remote environment. Lingkungan berikutnya yang lebih dekat dari remote adalah lingkungan industrial, sedangkan lingkungan yang berhadapan langsung dengan UKM adalah lingkungan operasinya (*operating environment*).

Lingkungan sangat jauh (*remote*) dicerminkan oleh dimensi-dimensi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Perubahan dimensi ini sangat

jas terlihat dewasa ini. Kita ambil contoh dimensi ekonomi yang sangat jelas terlihat dengan terjadinya perubahan ekonomi global dan domestik. Demikian juga dimensi politik dimana otonomi daerah yang terjadi sekarang ini merupakan bagian tak terlepas dari perubahan lingkungan remote secara keseluruhan. Kita tidak bisa lagi mengelola negara dan bangsa ini dengan mengandalkan sistem sentralistik. Otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kehidupan masyarakat termasuk UKM. Lingkungan industrial menyangkut dimensi industrial dimana UKM itu menjadi bagiannya. Di situ terlihat bagaimana struktur industri yang dihadapi oleh UKM, antara lain hambatan masuk dan keluar dalam pasar, posisi pemasok dan pembeli, kompetisinya, dan kebijakan industrial. Kebijakan industrial Indonesia belum mampu mengangkat UKM dalam bisnis internasional. Ketika pemerintahan Orde Baru, strategi industri substitusi impor yang berorientasi ke dalam (*inward looking*) menjadi pilihan. Sehingga industri pendukung (*supporting industry*) tidak berjalan baik. Pada era reformasi, memasuki pasar global, semestinya orientasi berubah ke strategi promosi ekspor (*export promotion*) yang mengandalkan keunggulan kompetitif produk domestik dan sistem industri pendukung. Hal ini menjadi penghambat berkembangnya UKM sebagai pelaku bisnis utama di Indonesia.

Lingkungan yang paling dekat adalah lingkungan operasi UKM itu sendiri yang secara langsung dihadapi oleh UKM. Lingkungan ini secara langsung mempengaruhi performa UKM. Kompetitor, kreditor, pelanggan, buruh, dan pemasok adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performa UKM. Penguasaan pangsa pasar salah satu faktor yang menentukan sejauhmana daya kompetisi UKM. Sedangkan dari sisi sistem kredit, perburuhan, dan pelanggan juga sangat nyata mempengaruhi UKM. Penguasaan pangsa pasar mencerminkan kemampuan penetrasi UKM di pasar dimana pangsa UKM masih rendah secara individu. Sistem kredit yang dicerminkan oleh akses yang rendah dan sukubunga kredit yang tinggi sampai saat ini menjadi penghambat operasi UKM. Sistem perburuhan di Indonesia masih dianggap oleh pebisnis menjadi penghambat operasi perusahaan di Indonesia baik dilihat dari regulasinya maupun kualitas buruhnya. Kebijakan pemerintah adalah elemen iklim yang sangat penting yang dapat menjadikan sistem perekonomian menjadi baik atau malah distorsi. Birokratisasi dan regulasi yang memunculkan aturan perijinan menjadi bidang “basah” dalam birokrasi tapi beban pada perusahaan. Faktor pendukung lain yang sangat kentara mempengaruhi adalah ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan jalan, pelabuhan, serta energi adalah mutlak untuk mengembangkan bisnis. Dapat dipastikan, infrastruktur masih sangat jelek di Indonesia sehingga menimbulkan biaya tinggi untuk transfer bahan baku dan produk. Faktor lingkungan operasional yang juga terlihat menjadi momok bagi UKM adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penegakan

hukum dan keamanan. Faktor-faktor ini sudah menjadi perbincangan hangat seluruh lapisan masyarakat karena Indonesia telah diakui sebagai negara yang sarat KKN, lemah penegakan hukum dan tidak aman, dan sampai saat ini masih belum mampu diatasi oleh pemerintah secara tuntas.

III. Lingkungan Jauh

Perubahan tatanan perekonomian dunia dewasa ini ditandai oleh kondisi “*unbalance economy*”. Pertarungan ekonomi antara China dan AS menjadi acuan dalam hal naik-turunnya perekonomian dan sangat menonjol ke permukaan dewasa ini. Kalau dimasukkan lagi perkembangan India dan sebagian kawasan Arab, antara lain Uni Emirat Arab (UEA), semakin terlihat lagi pertarungan ekonomi antara negara kaya dan berkembang yang semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi China yang sangat dasyat lebih dari 10%, aliran masuk FDI pada tahun 2004 sebesar USD 60.63 miliar (naik 13.31% dari 2003) dan pada tahun 2007 aliran FDI ke China semakin tinggi. Itu sebabnya, cadangan devisa China telah mencapai US \$1.2 triliun dan mesin-mesin produksi China beroperasi terus tanpa henti dan semakin memperbesar kapasitas. China sendiri telah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) juga bersama dengan UEA, yang mampu menyediakan dana mencapai lebih dari US 200 miliar. Ketersediaan dana yang sangat besar ini akan menempatkan China sebagai pelaku ekonomi dunia di seluruh penjuru. Pada satu sisi China mencapai surplus balance of payment (BOP) baik melalui neraca perdagangannya maupun neraca modalnya. Pada sisi lainnya, Amerika Serikat (AS) cenderung mengalami defisit neraca perdagangannya. Hal ini sangat mengkhawatirkan pihak AS dan berbagai cara dilakukan untuk bisa mengatasi defisit tersebut.

Hal ini juga yang menyebabkan naiknya permintaan China akan bahan bakar yang sangat tinggi yang tidak hanya bersumber dari minyak bumi juga batubara dan gas alam. Kemajuan ekonomi China tersebut menyebabkan harga minyak bumi akan terus naik. Kalau pada tahun 2004, kita masih memprediksi harga minyak bumi dunia sekitar US \$50 - 60 per barrel, ternyata pada pertengahan tahun 2008 saja harga minyak sudah mencapai lebih dari US \$140 per barrel. Tampaknya, kecenderungan “global unbalanced economy” telah terjadi akibat kemajuan ekonomi China yang luar biasa dan akan semakin besar manakala India dan Brazil mengikuti jejak China. Akan terjadi perubahan pola perekonomian dunia yang ujung-ujungnya juga berpengaruh pada pola hubungan antar negara baik dalam bidang politik maupun sosial. Kemampuan ekonomi dan penetrasi China ke seluruh dunia telah memaksa Federal Reserve Bank AS (Fed) menaikkan sukubunga untuk mengatasi defisit perdagangan AS dengan harapan neraca modal semakin membaik. Akibatnya, akan terjadi

fluktuasi pasar saham dan nilai tukar tinggi. AS juga meningkatkan perlindungan terhadap industri dan pertanian, serta harga minyak bumi akan tinggi. Tidak hanya itu, Jepang yang selama ini mengembangkan strategi *outward looking*, terutama *wideworld market development strategy*, telah mengubah strateginya menjadi lebih pada *inward looking*, khususnya FDI.

Bagi Indonesia, pertarungan ekonomi ini sangat berpengaruh di tengah upaya pemulihan ekonomi dari krisis. Kurs rupiah terhadap mata uang asing akan fluktuatif dimana kurs terhadap dollar AS akan sulit di bawah Rp 9000 per dollar dan juga tidak stabil. Ketika harga minyak bumi dunia telah mencapai lebih US \$125, APBN Indonesia goncang karena ternyata Indonesia bukan lagi sebagai negara net-exporter melainkan net-importer minyak bumi. Karena alasan beban subsidi yang sangat besar, pemerintah tak mampu lagi mempertahankan harga kelembagaan minyak bumi pada level dibawa Rp. 5000 per liter. Limpungnya APBN berpengaruh besar terhadap perekonomian, meskipun sebenarnya kontribusi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah relatif rendah. Ini menandakan bahwa pemerintah masih pemimpin dalam pergerakan ekonomi domestic. Tapi pencabutan subsidi secara langsung mempengaruhi dunia usaha dengan naiknya ongkos produksi yang sangat tinggi yang melemahkan daya saing perusahaan tidak hanya skala besar juga UKM. Disamping itu, fluktuasi ekonomi Indonesia akan sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan harapan sehingga tidak mampu mengurangi pengangguran secara nyata. Negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia akan selalu berupaya menyudutkan Indonesia agar iklim bisnis tidak kondusif dan investor tidak datang ke Indonesia.

Dampak lainnya yang juga sangat terasa adalah ketersediaan energi listrik yang sangat terbatas. Karena sebagian besar produksi listrik Indonesia tergantung pada bahan bakar minyak bumi maka mau tidak mau pasokan energi listrik sangat terbatas. Cara-cara pemadaman listrik secara bergilir katanya terpaksa ditempuh oleh PT. PLN untuk mengatasi pasokan yang sangat terbatas. Pemadaman ini ternyata berpengaruh besar pada proses produksi. Banyak perusahaan kehilangan pendapatan dari tidak beroperasinya mesin-mesin produksinya. Tidak hanya perusahaan UKM yang merasakan juga perusahaan skala besar, termasuk perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Bahkan beberapa perusahaan Jepang telah mengancam untuk hengkang dari Indonesia apabila persediaan energi listrik tidak cukup tersedia untuk mereka. Hengkangnya perusahaan asing bercitra buruk terhadap Indonesia dan menyurutkan aliran masuk modal asing ke Indonesia. Akhirnya, pengangguran semakin mengancam.

IV. Indikator Ekonomi Makro Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, pertumbuhan ekonomi aktual Indonesia sampai 5.6% atau rata-rata 4.72% per tahun. Peramalan untuk tahun 2006-2009 juga rendah 3.2-6.0% atau rata-rata 5.68%. Pertumbuhan ekonomi aktual dan ramalan ini jauh di bawah target 6.62% per tahun. Dengan demikian, sampai tahun 2005, PDB Indonesia masih di bawah USD 300 miliar dengan pendapatan per kapita di bawah USD 1280. Pada tahun 2009, diperkirakan PDB akan mencapai USD 460 miliar atau USD 1986 per kapita. Faktor kunci tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Pada tahun 2000, aliran FDI ke Indonesia USD - 4.6 miliar dan tahun 2004 hanya menjadi USD 1.02 miliar. Kontribusi investasi total terhadap PDB selama ini masih di bawah 20%. Dunia bisnis, skala besar dan UKM, tidak berkembang di Indonesia karena iklim tidak kondusif.

Moneter. Sisi moneter lebih terlihat pada sukubunga, kurs, dan kebijakan moneter. Dimensi moneter Indonesia sangat terkait dengan moneter dunia. Kebijakan Fed secara langsung mempengaruhi pasar uang domestik dan ujung-ujungnya kebijakan moneter. Meskipun cenderung turun sejak 2003, namun sukubunga pinjaman masih sangat tinggi di Indonesia. Demikian juga kurs masih tetap tinggi, di atas Rp 9000 per USD. Kebijakan moneter selalu mengacu pada stabilitas makro sehingga tinggi rendahnya tingkat sukubunga dan kurs bukan tujuan utama pengendalian. Bank Sentral Indonesia termasuk sangat konservatif dalam pengelolaan moneter.

Tabel 1. Perkembangan dan Peramalan Ekonomi Makro Indonesia, 2001-2009

No	Uraian	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pouulasi (jt orang)	209	212	215	218	220	223	226	229	232
2	PDB (USD m)	164	200	237	254	281	349	383	418	460
3	PDB per kapita (USD)	785	945	1106	1169	1279	1564	1694	1826	1986
4	Pertumbuhan PDB (%)	3.8	4.4	4.7	5.1	5.6	5.3	5.2	6.0	6.2
5	Inflasi (%)	12.6	10.0	5.1	6.4	17.1	7.0	5.8	4.9	4.0
6	Sukubunga SBI 1 bulan (%)	16.6	15.0	9.9	7.4	9.1	11.6	8.7	7.9	7.5
7	Sukubunga pinjaman (%)	18.6	19.0	16.9	14.2	15.9	18.3	15.4	14.6	14.2
8	Kurs Rp/\$	10261	9311	8577	8939	9704	8880	8772	8101	9377
9	Ekspor (USD m)	56.3	57.2	61.1	71.6	84.7	92.3	98.3	106.7	116.8
10	Impor (USD m)	31.0	31.3	32.6	46.5	56.8	64.0	71.0	80.8	91.7
11	Neraca dagang (USD m)	25.4	25.9	285	25.1	27.8	28.2	27.3	25.9	25.1

No	Uraian	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12	Ekspor minyak (USD m)	6.9	6.5	7.2	8.1	12.3	15.4	13.7	11.7	11.0
13	Neraca berjalan:									
	a. USD m	6.9	7.8	8.1	3.1	3.0	3.4	4.5	6.6	6.0
	b. % PDB	4.2	3.9	3.4	1.2	1.1	1.0	1.2	1.6	1.3
14	Cadangan devisa:									
	a. USD m	27.2	31.0	35.0	35.0	33.0	33.8	36.3	40.7	44.3
	b. Atasi impor (bln)	11.0	10.9	11.7	8.9	6.8	6.2	5.9	5.7	5.6
15	Utang LN:									
	a. USD m	133.1	131.3	135.4	137	133.5	135.5	135.2	134.8	135.2
	b. % PDB	80.8	65.4	57.0	53.9	47.5	38.7	35.3	32.3	29.4
16	Debt Service Ratio	199.0	191.8	188.6	148.3	153.1	154.6	153.4	152.0	153.7

Sumber: BMI, Q3 2006

Fiskal. Sisi fiskal lebih terlihat pada APBN dan kebijakan fiskal itu sendiri. Sistem defisit anggaran masih tetap mewarnai APBN. Defisit anggaran membengkak karena bencana alam sejak Aceh-Nias dan Jawa bagian Selatan. Kebijakan fiskal dengan sendirinya mengacu pada defisit anggaran. Dengan lebih ekspansif. Pada sisi lain, perpajakan akan dipacu dan pengeluaran akan dikurangi untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan rehabilitasi akibat bencana alam. Bappenas sudah mengatakan bahwa kebijakan

Neraca Pembayaran. Ekonomi internasional Indonesia yang ditandai oleh neraca pembayaran masih surplus sampai tahun 2005. Tapi selama 2001-2005, neraca perdagangan Indonesia cenderung turun, dari 4.2% dari PDB menjadi 1.1% dari PDB. Perkiraan tahun 2006-09, surplus neraca perdagangan akan tetap rendah sebagaimana tahun 2005. Tekanan harga minyak dunia menjadi faktor menurunnya surplus neraca. Untuk mengatasi neraca perdagangan ini maka Bank Sentral kemungkinannya akan memperketat kebijakan moneter agar meningkat surplus pada capital account, sebagaimana Fed.

Negara tujuan ekspor Indonesia masih terbatas. Lima besar Negara tujuan ekspor (berurutan dari terbesar ke terkecil) adalah Jepang, AS, Singapura, Korea Selatan, China, dengan pangsa di atas 56% selama tahun 2001-2004. Pada tahun 2004, ekspor Asia tujuan AS, Indonesia menduduki posisi ke 11 dari 18 negara Asia dengan nilai ekspor USD 4.5 miliar dan impor USD 1.0 miliar. Posisi Indonesia masih kalah dengan Kamboja, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Sri Lanka, apalagi dengan Hong Kong, Singapura, China, dan Korsel.

V. Faktor-faktor Lingkungan Bisnis

Sistem operasi perusahaan di Indonesia telah dikenal banyak oleh orang sebagai sistem yang tidak efisien. Memperhatikan potensi sumberdaya dan posisi strategis Indonesia dalam hubungan internasional, efisiensi perusahaan di Indonesia mestinya jauh lebih tinggi daripada perusahaan di Singapura, Malaysia, dan bahkan Vietnam. Namun karena iklim usaha yang tidak kondusif maka dunia usaha Indonesia, terutama UKM tidak mempunyai daya saing yang cukup dalam ekonomi yang mengglobal dewasa ini. Faktor-faktor lingkungan operasi yang mencerminkan ketidakefisienan dunia usaha Indonesia adalah cap KKN, *red tape*, perburuhan, penegakan hukum, keamanan, kepabeanan, perpajakan, dan birokratisasi dan regulasi. Bagaimana gambaran lingkungan bisnis dunia usaha di Indonesia dapat terlihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 tersebut secara jelas terlihat bahwa lembaga internasional, semacam Transparency International (TI), Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat, selalu menempatkan Indonesia dalam posisi yang rendah perihal iklim bisnis dan investasi. Persoalan KKN misalnya, TI menyatakan Indonesia berada pada peringkat tinggi dalam hal korupsi. Masalah korupsi ini memang sudah menjadi “kanker ganas” dalam tubuh negara ini. Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah terungkap bagaimana korupsi terjadi di Indonesia yang melibatkan semua lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari mulai pegawai negeri rendah dan tinggi sampai anggota DPR, saksi dan hakim. Akan semakin banyak lagi terungkap kasus KKN apabila KPK mau membongkar semua borok republik ini dalam hal KKN. Pada kondisi negara dan bangsa penuh dengan KKN maka akan sulit bagi siapa pelaku bisnis berperan di Indonesia apalagi internasional.

Tabel 2. Faktor-faktor Lingkungan Bisnis Indonesia

No.	Faktor-faktor lingkungan bisnis	Uraian
(1)	(2)	(3)
1	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Transparency International (TI): berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI), pada tahun 2005, skor CPI 2.2, jauh di bawah rata-rata Asian, 3.9, dan Eropa Barat 8.2. Pada tahun 2004 CPI 2.0 dengan peringkat 137 dari 145 negara

(1)	(2)	(3)
2	Red Tape	Bank Dunia: 29 prosedur untuk membuat kontrak dengan penyelesaian 225 hari. Di Asia Timur 24 prosedur dan 193 hari, anggota OECD 18 prosedur dan 213 hari
3	Perburuhan	Pada 2003, jumlah 102 juta dan aktif bekerja 150.9 juta orang. Partisipasi angkatan kerja 68.1% dimana 70% pekerja informal, upah di manufaktur USD 54 sebulan pada 2001
		<p>Pendidikan: pada 90/91, rata-rata masa sekolah 10 tahun di negara maju 15 tahun.</p> <p>Regulasi: banyak aturan. Bank Dunia menyatakan Employment Laws Index skor 57 pada selang 1-100 (low to very rigid) sedangkan Asia Timur 45, OECD 49. Fleksibilitas mempekerjakan 76 (Asia Timur 45) dan feleksibilitas memberhentikan 43 (Asia 30)</p>
4	Rejim Perdagangan	Tarif. Di bawah Asean, 7000 pos tarif ke 5% produk paling tidak 65% asal Asean. 2004, tariff 3-tier for Asean 0%, 2.5%, atau 5% and for non-Asean 0%, 5%, atau 10%. DBC membuat metode bea tidak transparan. Meski tariff impor produk makanan 5%, di lapangan bisa di atas 5%
5	Rejim Perpajakan	Corporate Tax. Standar 30%. CT progressif. Individual Tax. Income Tax progressively up to 35% di atas Rp 200 juta. Indirect Tax. Standar VAT 10% Capital Gains for individual or company
6	Peraturan perundang-undangan	Lebih 208 peraturan (UU, PP, Perpres, SE), lebih 5000 Perda bermasalah

(1)	(2)	(3)
7	Penegakan hukum dan keamanan	Premanisme menjadi bagian tak terpisahkan dalam bisnis. Seolah-olah pungutan adalah sesuatu yang wajar.
8	Infrastruktur	Jalan, pelabuhan (laut dan udara), angkutan darat, laut, udara, telekomunikasi, energi, air

Sumber: Dari beberapa publikasi

Masalah KKN semakin diperkuat oleh beban bangsa dan negara ini sebagai “red tape”, perburuhan, rejim perdagangan, rejim perpajakan, peraturan perundang-undangan, penegakan hukum dan keamanan, serta infrastruktur. Bank Dunia menyatakan bahwa di Indonesia harus melalui 29 prosedur untuk menyelesaikan kontrak dan harus pula memakan waktu yang sangat lama. Sementara negara lain tidak seperti itu. Dalam hal perburuhan, Bank Dunia menilai Indonesia sangat kaku dimana berdasarkan employment law index (ELI), rating Indonesia mencapai 57, di atas Asia Timur yang hanya 45. Sementara itu produktifitas buruh Indonesia juga lebih rendah tapi harus dibayar lebih tinggi akibat upah minimum dan semakin menambah beban perusahaan karena kewajiban membayar pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa memperhatikan masa kerja. Para pebisnis memang sangat mempersoalkan masalah perburuhan ini.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, birokratisasi dan regulasi menjadi ciri yang menonjol. Lebih dari 200 UU dan peraturan pada level nasional yang dianggap bermasalah karena tidak mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif. UU dan pertaturannya sering menjadi alat dalam rangka perijinan. Namun, setiap orang bisa memperoleh ijin meskipun melanggar kelayakan dengan membayar sejumlah uang yang tidak menjadi bagian dari penerimaan negara yang sah. Kalau dimasukkan lagi kategori Peraturan Daerah (Perda), keruwetan semakin tampak. Diperkirakan sedikitnya 5000 Perda bermasalah, artinya harus dicabut manakala kita ingin menggerakkan dunia usaha dan sektor riil secara nyata. Persoalan Perda ini tidak terlepas dari Otda yang telah bergulir sejak awal tahun 2000 dan berkembang sangat pesat. Kewenangan yang sangat besar pada daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, dan DPRD akibat Otda menjadikan Perda sebagai alat penguasa untuk mencapai target pribadi. Semua Perda menjadi instrumen menarik

pendapatan daerah yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan esensi sesungguhnya dunia usaha dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Perda semakin memperburuk iklim ketika menyangkut masalah nilai kepercayaan dan larangan yang semestinya bukanlah esensi dari Otda itu sendiri.

Penegakan hukum dan premanisme menjadi persoalan serius yang membentuk iklim tidak sehat. Kasus-kasus yang tidak sampai ke pengadilan selalu menjadi bahan pergunjungan, termasuk “jalan damai” ketika kasus sudah terpublikasi tapi tidak berlanjut. Banyak contohnya, antara lain kasus pemilik perusahaan yang menjadi obligor bermasalah dan tindakan anarkis oleh sekelompok orang atas perbedaan pendapat dan kepercayaan yang tidak diselesaikan melalui penegakan hukum. Jalan kompromi politik sering menonjol ketika kasus menyangkut petinggi pemerintahan, legislatif, ataupun yudikatif. Meskipun terakhir ini, KPK telah mampu memberikan harapan atas kasus KKN pejabat pemerintahan dan parlemen. Tapi belum cukup untuk membangun kepercayaan dalam rangka menciptakan iklim yang sehat. Persoalan lain dalam hal hukum yang dominan adalah munculnya premanisme sebagai salah satu bentuk pemerasan yang seolah-olah hal biasa. Sudah jamak diketahui oleh masyarakat bahwa pungutan liar telah terjadi secara kasat mata. Para pelaku premanisme tidak hanya perorangan, oknum petugas, juga organisasi massa. Bahkan premanisme bisa sangat terorganisasi dengan “back up” para petugas pemerintahan yang resmi. Sebagai contoh, untuk satu kontainer barang ekspor ke Taiwan dari Medan Sumatera Utara, seorang pebisnis harus mengeluarkan biaya transfer paling tidak US \$800. Sedangkan untuk barang sejenis, pengusaha Sri Langka hanya mengeluarkan US \$200¹. Pebisnis yang pabriknya berlokasi dekat di kawasan industri Bekasi mengeluhkan persoalan premanisme ini. Pengalaman mereka terungkap bahwa ketika kontainer masih di pagar pabrik saja sudah harus mengeluarkan uang siluman Rp1 juta, belum dihitung biaya siluman sampai masuk ke kapal di pelabuhan ekspor. Tidaklah mengherankan produk dunia usaha kita kalah bersaing dengan produk negara tetangga di pasar dunia. Bagaimanapun juga, premanisme ini harus diberantas walaupun akar persoalannya adalah pengangguran dan kemiskinan.

Menyangkut infrastruktur sebenarnya tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mampu menyelesaikannya. Ketersediaan infrastruktur sangat rendah dalam menunjang dunia usaha di Indonesia. Jangankan di luar P. Jawa, di Jakarta sendiri infrastruktur sangat tidak memadai. Dalam hal jalan misalnya, kalau tidak rusak ya macet. Hampir semua jalan di pintu masuk pabrik tidak

¹ Keluhan ini disampaikan seorang pengusaha di Lubuk Pakan, Deli Serdang, Sumatera Utara ketika diwawancarai oleh BBC London pada siaran berita bahasa Indonesia.

mendukung sistem operasi bisnis, seperti yang terlihat di lokasi industri di Jalan Raya Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Bahkan jalan masuk pelabuhan utama Indonesia, Tanjung Priok, sangat tidak memadai sebagai pintu gerbang negara melalui laut. Wilayah pelabuhan di Indonesia pada umumnya termasuk rawan baik dari sisi keamanan maupun kepabeanan. Padahal kalau kita lihat berbagai kesatuan petugas keamanan, yakni polisi, AL, KPLP, dan Bea Cukai, berada di wilayah itu. Ini sangat berbeda misalnya di negara lain dimana pelabuhan laut adalah tempat biasa yang tidak menjadi beban bagi setiap orang.

Iklm usaha semakin terasa tidak kondusif ketika persoalan perdagangan dan perpajakan menjadi penghambat. Rejim perdagangan Indonesia dinilai sebagai rejim yang tidak mendorong perdagangan karena pengenaan bea masuk yang termasuk tinggi dan tidak transparan. Pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai mengimplementasikan sistem tarif atau bea tidak transparan. Hal itu mengakibatkan munculnya transaksi di luar sesmestinya sehingga ujung-ujungnya tarif menjadi tinggi. Rejim perpajakan juga kurang menarik minat pebisnis karena tarifnya yang lebih tinggi dari standar. Misalnya, tarif standar corporate tax 30% namun dikenakan progressif sehingga tarif menjadi di atas 30%. Demikian juga value added tax (VAT). Rejim perdagangan dan perpajakan ini mewarnai iklim dunia usaha yang tidak kondusif.

VI. Rating Lingkungan Politik, Ekonomi, dan Bisnis

Bagaimana wujud iklim dunia usaha Indonesia dapat kita ikuti dari beberapa hasil pemeringkatan Indonesia dalam beberapa hal. Survey prospek bisnis untuk mengetahui risiko ekonomi telah memperlihatkan peringkat beberapa negara dengan melihat dua aspek, yakni risiko politik, politik, dan bisnis. Faktor risiko Indonesia masih cukup tinggi yang menunjukkan iklim bisnis dan investasi tidak kondusif. BMI yang bermarkas di Singapura memperlihatkan rating tersebut baik dalam jangka pendek (short-term) dan panjang (long-term) pada Tabel 3. Pada Tabel 3 terlihat rating berdasarkan risiko politik dimana short-term politic rating Indonesia 59.0 dengan peringkat 99 dari 125 negara. Posisi Indonesia jauh di bawah Singapura sebagai peringkat I, juga Malaysia, Laos, dan bahkan Myanmar dan Kamboja. Posisi Indonesia di atas Thailand, Korea Utara, Filipina, Sri Lanka, Pakistan, dan Bangladesh. Sedangkan Long-term politic ratingnya 51.7 dengan peringkat 87 dari 125 negara. Posisi ini di bawah India, Taiwan, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Filipina, dan Sri Lanka. Posisi Indonesia di atas Kamboja, China, Pakistan, Bangladesh, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Korea Utara (Tabel 3).

Tabel 3. Short- and Long-term Political Ratings and Ranks Negara

Negara	Short-term Political		Long-term Political	
	Ratings	Rank	Rating	Rank
Singapura	88.0	3	73.3	34
Australia	82.0	15	85.0	15
New Zealand	80.0	23	85.0	15
Vietnam	80.0	23	41.0	119
Jepang	76.0	32	92.5	5
Malaysia	76.0	32	60.0	68
Laos	75.0	39	41.7	115
China	74.0	44	46.7	103
Hong Kong	74.0	44	55.0	76
Taiwan	67.0	74	66.7	74
Myanmar	66.0	76	41.7	115
India	63.0	86	68.3	46
Korea Selatan	63.0	86	63.3	60
Kamboja	60.0	97	48.8	99
<i>Indonesia</i>	<i>59.0</i>	<i>99</i>	<i>51.7</i>	<i>87</i>
Thailand	59.0	99	58.3	71
Korea Utara	55.0	111	28.3	125
Filipina	53.0	115	55.0	76
Sri Lanka	53.0	115	54.2	79
Pakistan	49.0	123	45.0	108
Bangladesh	46.0	125	41.7	115
Regional Avg	66.5		57.3	
Emerging Market Avg	65.3		58.2	
Global Market Avg	67.5		62.9	

Sumber: BMI Q3 2006

Secara keseluruhan, rating Indonesia masih di bawah rata-rata regional yang mencapai 66.5 untuk risiko short-term dan 57.3 pada long-term. Demikian juga bila dibandingkan dengan rata-rata negara sedang bangkit (emerging market) dan pasar global (global market), posisi Indonesia masih lebih rendah. Rating dan peringkat risiko politik ini menggambarkan masih tingginya tingkat risiko bisnis di Indonesia ditinjau dari politik. Sebenarnya, sejak perubahan pemilihan presiden RI, gubernur, bupati, dan walikota dari perwakilan di parlemen menjadi pemilihan langsung telah mengubah wajah Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dan sukses menjalankan pemilihan umum. Hal itu juga semakin nyata ketika rakyat bebas mengeluarkan pendapat tanpa perlu takut. Namun, kondisi itu belum cukup untuk menjadikan Indonesia berisiko akibat politik. Demonstrasi sebagian komponen rakyat yang disertai oleh anarkis dan kekerasan untuk memaksakan kehendak atas perbedaan pendapat memang menonjol dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Disamping itu,

sistem presidensial yang dianut Indonesia menjadi paradoks ketika praktek pemerintahan kuasi parlementer. Sangat jelas terlihat ketika Presiden SBY misalnya, sering menjadi ragu mengambil keputusan akibat memperhitungkan risiko politik menurut pandangannya atas keputusannya karena kabinetnya koalisi. Hal ini jelas menjadi contoh-contoh risiko politik.

Tabel 4. Short- and Long-term Economic Ratings dan Ranks Negara

Negara	Short-term Economic		Long-term Economic	
	Ratings	Rank	Rating	Rank
China	81.0	1	80.0	2
Singapura	86.0	6	79.4	3
Taiwan	86.0	6	76.1	8
Korea Selatan	81.0	16	80.0	2
Hong Kong	77.0	22	62.6	50
Jepang	77.0	22	70.3	22
New Zealand	77.0	22	71.0	19
Malaysia	74.0	30	76.1	8
India	69.0	46	65.2	40
Australia	67.0	53	78.1	5
Thailand	67.0	53	69.0	27
Vietnam	63.0	62	55.5	67
<i>Indonesia</i>	<i>62.0</i>	<i>65</i>	<i>65.2</i>	<i>40</i>
Pakistan	53.0	97	58.1	59
Filipina	53.0	97	54.8	70
Kamboja	51.0	101	na	na
Sri Lanka	49.0	107	49.7	89
Laos	42.0	121	na	na
Bangladesh	41.0	123	57.4	62
Regional Avg	66.6		67.3	
Emerging Market Avg	60.0		58.1	
Global Market Avg	62.7		60.7	

Sumber: BMI Q3 2006

Bagaimana dengan risiko ekonomi? Rating risiko ekonomi Indonesia agak berbeda dengan risiko politik. Perbedaan terlihat pada *short-term* dan *long-term*. Pada *short-term*, risiko ekonomi Indonesia mirip dengan risiko politik tapi pada *long-term*, risiko ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan emerging market dan global market (Tabel 4). Pada Tabel 4 terlihat rating *short-term economic* 62 sehingga Indonesia menduduki peringkat 65 dari 123 negara. Posisi Indonesia jauh di bawah China dan Singapura serta

Malaysia, India, Thailand, dan Vietnam. Posisi Indonesia di atas Pakistan, Filipina, Kamboja, Sri Lanka, Laos, dan Bangladesh. *Long-term Economic Rating* Indonesia 65.2 dengan peringkat 40 dari 89 negara. Posisi ini di bawah Singapura, Malaysia, Taiwan, China, Thailand, dan India. Posisi ini di atas Hong Kong, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka.

Posisi Indonesia tersebut menggambarkan tingkat risiko Indonesia yang lebih besar dari beberapa negara Asia yang menjadi kompetitor Indonesia dalam ekonomi. Pebisnis akan lebih memilih Negara yang relatif lebih stabil perekonomiannya daripada Indonesia. Sebagai contoh adalah Vietnam. Dengan risiko ekonomi yang lebih rendah, aliran dana investasi akan cenderung ke Vietnam daripada Indonesia. Meskipun dalam jangka pendek risiko ekonomi Indonesia relatif rendah, dalam jangka panjang ada perbaikan risiko. Sehingga ada harapan yang lebih baik melakukan bisnis di Indonesia dengan membaiknya iklim ekonomi.

Tabel 5. Business Environment Ratings dan Rank Negara

Sumber: BMI Q3 2006

Singapura
Hong Kong
New Zealand
Australia
Jepang
Taiwan
Korea Selatan
Malaysia
Thailand
China
Vietnam
Filipina
Sri Lanka
India
<i>Indonesia</i>
Kamboja
Laos
Bangladesh
Pakistan
Korea Utara
Regional
Emerging
Global

The AmCham (Kamar Dagang) AS telah menyurvei anggotanya menyangkut lingkungan bisnis di Asia Tenggara. Hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata rating regional, *emerging market*, dan *global market* masing-masing 52.3, 44.7, dan 48.7. Negara-negara yang mempunyai risiko politik dan ekonomi rendah juga mencapai rating yang tinggi, seperti negara maju dan beberapa negara berkembang di Asia. Terungkap, *Business Environment Rating* Indonesia hanya 40.6 sehingga Indonesia hanya pada peringkat 88 dari 131 negara. Posisi ini di bawah Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Thailand, China, Filipina, Vietnam, Sri Lanka, dan India. Posisi ini sedikit menghibur karena posisi Indonesia masih di atas Kamboja, Laos, Bangladesh, Pakistan, Korea Utara, dan Myanmar (Tabel 5). Sayangnya, negara-negara yang berada di bawah Indonesia bukanlah padanan sebenarnya dari Indonesia.

Apabila *political rating*, *economic rating*, dan *business rating* dipetakan pada *Fourth Quadrant* maka Indonesia masuk dalam kuadran III, yaitu kluster negara-negara risiko tinggi baik politik, ekonomi, maupun bisnis. Dalam hal Indonesia satu kluster dengan Filipina, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Posisi pada kluster III merupakan posisi yang paling rendah dari semua kluster. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan strategi yang jitu untuk memperbaiki iklim dunia usaha.

VII. Penutup

Sangat menarik melihat kondisi iklim UKM di Indonesia. Secara jelas terlihat iklim usaha UKM tidak dapat dipisahkan dari iklim dunia bisnis secara keseluruhan. Sebagai faktor lingkungan eksternal, iklim usaha sangat mempengaruhi performa ekonomi dan bisnis semua pelaku bisnis. Dari gambaran di atas, iklim usaha Indonesia masih tidak kondusif sehingga risiko bisnis menjadi besar. Risiko besar menimbulkan ongkos yang tinggi yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya daya saing dunia usaha. Itu sebabnya, UKM yang semestinya harus menjadi tulang punggung struktur perekonomian Indonesia masih belum terwujud sepenuhnya sementara perusahaan skala besar hanya mampu memanfaatkan friksi jangka pendek mengakumulasi kapital dengan laba yang tercipta.

Perbaikan iklim usaha masih dapat dilakukan dimana pemerintah memegang peran sangat sentral melalui birokrasinya. Sejalan dengan era otonomi daerah, Presiden RI yang memegang tampuk pemerintahan dan negara harus berani melakukan pembaharuan sistem dengan mengubah sistem perundang-undangan yang sepenuhnya mengarah pada dukungan perbaikan ekonomi secara total dan paradigma birokrasi dari orientasi abdi negara dan bangsa menjadi orientasi pelayanan sebagai kewajiban dan pencapaian hasil

(*achievement spirit*). Gubernur, bupati, dan walikota juga harus mampu mengembangkan peraturan dan kebijakan yang pro-bisnis dimana sistem keterkaitan antar usaha, terutama UKM sebagai industri pendukung, harus menjadi pola dunia usaha. Dengan demikian semua persoalan sebagaimana diuraikan sebelumnya akan dapat diatasi oleh sistem pemerintahan yang bersih. Dan Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2006). The Indonesia Business Forecast Report. *Business Monitor International*, Ltd Q3 2006.
- Besanko, David, David Dranove, and Mark Shanley, (1995). *Economics of Strategy*. Wiley.
- Pearce II, John A and Richard B. Robinson Jr., (2000). *Strategic Management. Formulation, Implementastion, and Control*. 7th Edition, Irwin McGraw-Hill.
- Situmorang, Johnny W., (2005). *Pembangunan Nasional, Investasi, dan UKM*. Majalah Infokop ISSN: 0126-813X, no 27 tahun XX 2005. Kementerian KUKM Jakarta.
- Yip, George S., (1992). *Total Global Strategy*. Managing for Worldwide Competitive Advantage. Prentice Hall.